BAB III

**BIOGRAFI DAN PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER TENTANG
KEADILAN SAKSI DALAM AKAD NIKAH**

A. Biografi Ulama Kontemporer

Pemikiran seorang ulama tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kehidupan, pendidikan, dan kiprah intelektualnya. Dengan mengetahui biografi para ulama kontemporer, pembaca akan lebih memahami landasan pemikiran mereka, terutama dalam menanggapi isu-isu hukum keluarga Islam, termasuk tentang konsep keadilan saksi dalam akad nikah.

Adapun ulama kontemporer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Mustafa Az-Zuhaili adalah salah satu ulama besar dan pakar hukum Islam kontemporer yang lahir di desa Dair ‘Atiyyah, Suriah, pada tahun 1932. Ia berasal dari keluarga yang dikenal religius, yang menjadi faktor utama dalam membentuk karakter dan kecintaan Az-Zuhaili terhadap ilmu agama. Lingkungan pendidikan dan keluarga yang kental dengan nilai-nilai Islam, menjadikan dirinya tumbuh sebagai sosok yang disiplin, santun, dan tekun dalam menuntut ilmu.

Az-Zuhaili menempuh pendidikan dasar di Damaskus dan sejak kecil sudah menunjukkan minat mendalam terhadap kajian Al-Qur’an dan ilmu-ilmu keislaman. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia

melanjutkan studi ke Kuliah Syariah Universitas Damaskus, tempat di mana ia meraih gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

Pendidikan lanjutannya ia tempuh di Universitas Al-Azhar Kairo, yang dikenal sebagai salah satu pusat studi Islam terbesar di dunia dan banyak belajar dari ulama besar seperti Abd al-Rahman Taj, Mustafa al-Zarqa, dan juga terinspirasi oleh pendekatan metodologis para ahli fiqh muqaran (fiqh perbandingan). Di sana, Az-Zuhaili memperoleh gelar Magister dan Doktor dalam bidang syariah dan ushul fiqh. Disertasinya berjudul “Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami” (Pengaruh Perang dalam Hukum Islam), yang kemudian diterbitkan sebagai salah satu referensi hukum internasional Islam.

Karier akademiknya sangat cemerlang. Ia menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, serta menjadi pembicara di berbagai forum ilmiah dan seminar internasional. Kegiatan mengajarnya tidak hanya di Suriah, tetapi juga di berbagai negara seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Sudan. Ia juga aktif dalam Majelis Ulama dan berbagai lembaga fatwa di dunia Islam.

Sebagai seorang intelektual, Wahbah Az-Zuhaili dikenal sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Salah satu karya monumentalnya adalah “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu” ensiklopedia hukum Islam komprehensif yang mengupas seluruh mazhab fiqh utama dalam Islam,

dengan pembahasan dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan pendapat kontemporer.⁵²

Dalam karyanya tersebut, Az-Zuhaili menulis:

والشهادة في النكاح شرط لصحة العقد، وهي واجبة باتفاق المذاهب الأربعة، لما فيها من التوثيق وحفظ الحقوق ومنع التنازع

“Kesaksian dalam akad nikah adalah syarat sahnya akad, dan ini disepakati oleh keempat mazhab karena di dalamnya terdapat aspek dokumentasi, penjagaan hak-hak, dan pencegahan dari perselisihan.”⁵³

Pernyataan ini menegaskan pentingnya kehadiran saksi dalam akad nikah, yang tidak hanya berdimensi legal-formal tetapi juga berfungsi sebagai penjaga hak dan kehormatan keluarga.

Namun, Az-Zuhaili menekankan bahwa keadilan saksi harus dipahami secara realistis. Ia berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah saksi yang tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar dan tidak memiliki kebiasaan melakukan perbuatan dosa kecil secara terang-terangan. Jika saksi tersebut dikenal di masyarakat sebagai orang baik dan dipercaya, maka kehadirannya sebagai saksi dalam akad nikah sudah memenuhi syarat.⁵⁴

Dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, beliau menulis:

العدالة هي الاستقامة الظاهرة على الشخص، وترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Dalil-Dalilnya*, Jilid 1, terj. Team Litbang al-Mahira, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. xviii–xx.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 135

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 136

“Keadilan adalah kelurusan (*istiqamah*) yang tampak pada seseorang, meninggalkan dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil.”⁵⁵

Pandangan ini mencerminkan pendekatan moderat Az-Zuhaili yang berpijak pada realitas sosial, serta tidak membebani umat dengan standar yang tidak realistis. Bagi Az-Zuhaili, prinsip *al-taysir* (kemudahan) dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah) harus menjadi acuan utama dalam penerapan hukum, termasuk dalam hal keadilan saksi.

Di sepanjang kariernya, Az-Zuhaili menghasilkan lebih dari 50 karya ilmiah yang diakui secara internasional. Beberapa karyanya yang terkenal selain *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* adalah:

- a. *Ushul al-Fiqh al-Islami*
- b. *Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*
- c. *Fiqh al-Ahwal al-Syakhsiyyah*
- d. *Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*

Ia wafat pada 8 Agustus 2015, meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga bagi dunia Islam. Pemikiran-pemikirannya terus menjadi rujukan utama dalam pengembangan hukum keluarga Islam, termasuk di Indonesia.

2. Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu ulama paling berpengaruh di dunia Islam kontemporer. Ia lahir di desa Shafth Turaab, Provinsi Gharbiyyah, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Kehidupan masa

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 137.

kecilnya diwarnai dengan suasana keagamaan yang kuat, terutama karena ia yatim sejak usia dua tahun dan dibesarkan oleh pamannya yang seorang agamawan.

Sejak usia dini, al-Qardhawi sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia berhasil menghafal Al-Qur'an sebelum menginjak usia 10 tahun. Kecintaannya terhadap ilmu syariah membawanya masuk ke Al-Azhar, salah satu universitas Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Di Al-Azhar, ia menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin, lalu melanjutkan ke Fakultas Bahasa Arab, dan akhirnya memilih fokus pada Fakultas Syariah, menunjukkan keluasan penguasaannya dalam berbagai cabang ilmu Islam.

Yusuf al-Qardhawi kemudian meraih gelar Magister dan Doktor dari Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Disertasinya berjudul "Zakat dan Pengaruhnya terhadap Penyelesaian Masalah Sosial", yang kemudian diterbitkan dan menjadi rujukan penting dalam bidang ekonomi Islam.

Karier akademiknya sangat gemilang. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar, dan menjadi anggota berbagai lembaga fatwa serta forum internasional, termasuk Majma' al-Fiqh al-Islami (Organisasi Konferensi Islam) dan Majelis Ulama Muslimin Internasional.

Dalam proses pendidikannya di Al-Azhar, al-Qaradawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran reformis seperti Imam Muhammad Abduh dan Rashid Rida, meskipun ia tidak belajar langsung dari mereka. Pemikiran kedua tokoh ini sampai kepadanya melalui warisan intelektual yang dibawa

oleh para dosen dan ulama Al-Azhar yang menjadi guru al-Qaradawi, termasuk Syekh Mahmud Syaltut, yang merupakan Grand Syaikh al-Azhar dan tokoh terkemuka dalam fiqh toleransi antar mazhab.

Syekh Mahmud Syaltut memberikan pengaruh besar dalam cara al-Qaradawi melihat fleksibilitas hukum Islam dan pentingnya ijtihad dalam konteks sosial. Selain itu, al-Qaradawi juga mengagumi gagasan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, yang mengedepankan pendekatan sosial dalam dakwah dan hukum.

Al-Qardhawi juga dikenal sebagai ulama yang aktif berdakwah dan menulis. Ia menghasilkan lebih dari 120 karya tulis yang tersebar di berbagai bidang, mulai dari fiqh, akidah, politik Islam, hingga ekonomi syariah. Beberapa karya utamanya yang dikenal luas di dunia Islam adalah:

- a. Fiqh al-Awlawiyat (Fiqh Prioritas)
- b. Fiqh al-Zakah
- c. Fiqh al-Jihad
- d. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam
- e. Fiqh al-Mu'ashir⁵⁶

Dalam karya monumental Fiqh al-Awlawiyat, Yusuf al-Qardhawi menyampaikan kritik terhadap cara pandang sebagian umat Islam yang cenderung kaku dan terlalu berpegang pada formalitas hukum tanpa mempertimbangkan prioritas dan maslahat. Ia menulis:

⁵⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, terj. As'ad Yasin, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. xix–xxii.

من الخطأ الجمود على النصوص دون فهم واقع الناس ومراعاة مقاصد الشريعة، فإن

الفقه الصحيح هو الفقه الذي يوازن بين النصوص والمصالح⁵⁷

“Adalah sebuah kesalahan berpegang kaku pada teks-teks hukum tanpa memahami realitas masyarakat dan memperhatikan tujuan syariat. Fiqh yang benar adalah fiqh yang mampu menyeimbangkan antara teks dan kemaslahatan.”⁵⁸

Pemikiran ini menjadi dasar penting dalam pendekatan Yusuf al-Qardhawi terhadap berbagai masalah kontemporer, termasuk dalam isu hukum keluarga. Ia berpendapat bahwa hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat akad nikah, harus dipahami secara moderat, realistis, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam hal keadilan saksi, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa syarat keadilan harus tetap dipegang, tetapi penerapannya tidak boleh menjadi sebab terjadinya kesulitan bagi umat. Ia menolak pemahaman yang memaksakan syarat keadilan sampai kepada taraf ideal yang tidak realistis di tengah masyarakat modern.

Menurutnya, saksi yang tidak dikenal sebagai pelaku maksiat terang-terangan, tidak melakukan perbuatan yang merusak martabat, dan diterima oleh masyarakat sebagai orang yang jujur dan amanah, maka sudah cukup memenuhi syarat keadilan.⁵⁹

Dalam Fiqh al-Mu’ashir, ia menulis:

⁵⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Awlawiyat* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995), hlm. 15.

⁵⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Prioritas*, terj. Mu’ammal Hamidy, cet. ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 30.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

العدالة المطلوبة في الشهود هي العدالة الظاهرة في السلوك العام، لا العدالة المثالية التي قد لا تتوفر إلا في القليل من الناس

“Keadilan yang disyaratkan bagi para saksi adalah keadilan yang tampak dalam perilaku umum, bukan keadilan ideal yang mungkin hanya terdapat pada segelintir orang.”⁶⁰

Pandangan ini sejalan dengan prinsip al-taysir (kemudahan) yang menjadi dasar pemikiran al-Qardhawi. Ia selalu menekankan bahwa hukum Islam datang untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan umat. Prinsip ini ia pegang teguh sepanjang hidupnya, baik dalam kajian akademik, fatwa, maupun dalam aktivitas dakwah.

Di samping menjadi ulama, al-Qardhawi juga dikenal sebagai intelektual dan pemikir yang berani menyuarakan isu-isu keumatan di forum internasional. Pandangan-pandangannya sering menjadi rujukan dalam perumusan fatwa internasional. Namun, tidak sedikit pula pendapatnya yang menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan yang berpandangan konservatif.

Yusuf al-Qardhawi wafat pada tanggal 26 September 2022 di Doha, Qatar, dalam usia 96 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun, karya-karya dan pemikirannya tetap hidup dan menjadi bagian penting dari khazanah hukum Islam kontemporer.

3. Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah adalah salah satu ulama dan pemikir hukum Islam terkemuka pada abad ke-20 yang memiliki kontribusi besar

⁶⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Mu'ashir* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), hlm. 123.

dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan pemikiran keislaman kontemporer. Ia lahir di kota Mahalla al-Kubra, Mesir, pada tahun 1898. Lingkungan keluarganya dikenal religius dan taat beragama, sehingga sejak kecil Abu Zahrah terbiasa dengan tradisi keilmuan Islam.

Pendidikan dasarnya ia tempuh di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo, sebuah lembaga pendidikan Islam terkemuka yang melahirkan banyak ulama besar dunia. Di Al-Azhar, Abu Zahrah menekuni berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu Al-Qur'an, hadis, ushul fiqh, hingga filsafat Islam. Abu Zahrah tidak banyak menulis tentang siapa gurunya secara langsung, namun ia berada dalam tradisi ilmiah yang sama dengan Muhammad Abduh dan Rashid Rida, terutama dalam upayanya menafsirkan ulang fiqh klasik untuk menjawab tantangan zaman modern. Ia dikenal luas melalui karyanya *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*, yang menjadi referensi penting dalam hukum keluarga Islam. Pemikiran Abu Zahrah berpengaruh besar dalam membentuk pendekatan hukum Islam yang adil, berimbang, dan relevan.

Setelah menyelesaikan studinya, Abu Zahrah memulai karier sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Selain mengajar, ia juga dikenal sebagai pembicara di berbagai forum ilmiah dan aktif dalam kajian-kajian keislaman di Mesir maupun di berbagai negara Timur Tengah. Karier akademiknya tidak hanya membawanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai salah satu tokoh penting dalam pembaruan pemikiran hukum Islam. Abu Zahrah dikenal sebagai ulama yang memiliki pandangan rasional dan progresif dalam memahami syariat Islam. Ia sangat menekankan pentingnya

memahami maqashid al-syari'ah (tujuan syariat) dalam menetapkan hukum, serta memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa karya ilmiahnya yang paling berpengaruh meliputi:

- a. Usul al-Fiqh
- b. Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah
- c. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah
- d. Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami⁶¹

Karya-karyanya menjadi rujukan penting di berbagai perguruan tinggi Islam di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Usul al-Fiqh, Abu Zahrah menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami semata-mata berdasarkan teks, tetapi harus dihidupkan dengan memahami maqashid-nya. Ia menulis:

لا يجوز أن يُفصل الفقه عن مقاصده، وإلا تحول إلى أحكام جامدة لا تخدم مصالح

الناس⁶²

“Tidak boleh fiqh dipisahkan dari tujuan-tujuannya (maqashid), sebab jika itu terjadi, maka fiqh akan menjadi hukum yang kaku dan tidak bermanfaat bagi kepentingan manusia.”⁶³

Pandangan ini menunjukkan komitmen Abu Zahrah terhadap penerapan hukum Islam yang dinamis dan mampu memberikan solusi nyata bagi kehidupan umat.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Perdata Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)*, terj. Rika Rahim dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. xiii–xvii.

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 23

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih: Pemikiran, Metode, dan Sejarah Perkembangannya*, terj. Moh. Zahrah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 23.

Dalam isu hukum keluarga, terutama tentang syarat keadilan saksi, Abu Zahrah berpandangan bahwa keadilan saksi adalah bagian dari mekanisme syariah untuk menjaga kehormatan akad dan hak-hak para pihak. Namun, ia menegaskan bahwa keadilan tersebut harus dipahami secara proporsional, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Menurutnya, saksi yang tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar, yang diterima di masyarakat sebagai orang yang dapat dipercaya, sudah dianggap memenuhi syarat keadilan. Ia menolak pemahaman yang menjadikan syarat keadilan saksi sebagai penghalang yang menyulitkan pernikahan di masyarakat.⁶⁴

Dalam *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Abu Zahrah menulis:

العدالة في الشهادة ليست كمالات شخصيا، بل هي استقامة تظهر في التعامل مع الناس،
ويُعرف بها صاحبها⁶⁵

“Keadilan dalam persaksian bukanlah kesempurnaan pribadi, tetapi kelurusan yang tampak dalam interaksi sosial, dan dikenal oleh orang-orang di sekitarnya.”⁶⁶

Pernyataan ini menjadi bukti bahwa Abu Zahrah lebih menekankan aspek sosial dalam menilai keadilan saksi, bukan standar ideal yang sulit dicapai di dunia nyata.

Abu Zahrah juga kritis terhadap pendekatan tekstualis yang memahami hukum Islam tanpa mempertimbangkan dinamika sosial. Ia

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, hlm. 45.

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 112.

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Perdata Islam (Ahkām al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah)*, terj. Ahmad Hanafi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 112..

berpandangan bahwa tugas ulama bukan hanya memelihara teks, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan dapat menjawab kebutuhan dan masalah umat Islam di setiap zaman.

Pemikirannya tentang keadilan saksi sangat relevan dengan konteks masyarakat modern, termasuk Indonesia, di mana pelaksanaan akad nikah seringkali dijadikan formalitas administratif semata. Pemikiran Abu Zahrah mengingatkan pentingnya menjaga substansi keadilan saksi agar fungsi sosial dan hukum dari pernikahan tetap terjaga.

Muhammad Abu Zahrah wafat di Kairo pada tahun 1974, namun karya-karya dan pemikirannya terus menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Ia dikenang sebagai ulama yang berjasa besar dalam memadukan antara teks dan konteks, antara norma syariat dan kebutuhan masyarakat.

B. Pemikiran Ulama Kontemporer tentang Keadilan Saksi dalam Akad

Nikah

Para ulama kontemporer memberikan pandangan yang beragam namun saling melengkapi dalam memahami konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah. Pemikiran mereka lahir dari kepekaan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern, serta berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah yang menjadi fondasi dalam menetapkan hukum. Berikut adalah uraian pemikiran masing-masing ulama yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

1. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Keadilan Saksi

Wahbah Az-Zuhaili adalah ulama yang memadukan antara pendekatan tekstual dan maqashid dalam memahami hukum Islam. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Az-Zuhaili menegaskan bahwa kehadiran saksi merupakan syarat sah akad nikah yang disepakati oleh para ulama.⁶⁷

Namun, ia juga memberikan pemahaman yang moderat terhadap keadilan saksi. Menurut Az-Zuhaili, keadilan saksi tidak harus diukur dari standar ideal yang sulit dicapai di masyarakat. Yang penting adalah saksi tersebut tidak dikenal sebagai pelaku maksiat secara terang-terangan dan masih diterima oleh masyarakat sebagai orang yang dapat dipercaya.⁶⁸

Pandangan Az-Zuhaili menegaskan pentingnya menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariat dengan realitas sosial. Ia menolak pandangan yang terlalu kaku dalam menilai keadilan saksi karena berpotensi menimbulkan kesulitan dalam praktik kehidupan masyarakat.

2. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Keadilan Saksi

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama yang mengedepankan prinsip kemaslahatan umat dan kemudahan dalam penerapan hukum Islam. Dalam pandangannya, keadilan saksi tetap merupakan syarat sah akad nikah, namun tidak boleh dipahami secara kaku sehingga justru menyulitkan masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Dalil-dalilnya* (terj. Saiful Mujani et al.), Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 123.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Dalil-dalilnya* (terj. Saiful Mujani dkk.), Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 62.

Dalam bukunya *Fiqh al-Awlawiyat*, al-Qardhawi menegaskan pentingnya memahami realitas masyarakat sebelum menerapkan hukum. Ia berpendapat bahwa prioritas utama dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, dalam hal keadilan saksi, yang lebih penting adalah bagaimana saksi tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang amanah dan tidak melakukan perbuatan maksiat terang-terangan.⁶⁹

Al-Qardhawi juga mengingatkan agar jangan sampai penafsiran terhadap syarat keadilan justru menjadi penghalang bagi akad nikah yang sah. Ia menekankan bahwa hukum harus hidup dan relevan dengan masyarakat, bukan menjadi beban yang menambah kesulitan umat.⁷⁰

3. Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Keadilan Saksi

Muhammad Abu Zahrah adalah tokoh ulama yang dikenal dengan pendekatan rasional dan sosial dalam memahami hukum Islam. Dalam *Ahkām al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*, Abu Zahrah menekankan bahwa syarat keadilan saksi harus dipahami dalam konteks menjaga maqashid al-syari'ah.⁷¹

Menurutnya, keadilan saksi bukanlah tuntutan atas kesempurnaan moral yang sulit ditemukan di masyarakat, tetapi lebih kepada reputasi sosial yang melekat pada seseorang. Saksi yang dikenal sebagai orang jujur, amanah, dan tidak melakukan perbuatan tercela di hadapan publik, sudah memenuhi syarat keadilan dalam perspektif Abu Zahrah.

⁶⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Prioritas: Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*, terj. As'ad Yasin, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 24.

⁷⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Prioritas: Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*, terj. As'ad Yasin, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 33.

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Perkawinan dalam Islam (Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah)*, terj. Ahmad Rofi' Usmani, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 45.

Ia juga mengingatkan bahwa hukum Islam harus fleksibel dalam penerapannya agar tetap sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Abu Zahrah berpandangan bahwa menjadikan syarat keadilan saksi terlalu berat hanya akan menyulitkan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menjunjung tinggi kemudahan dan keadilan sosial.

Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah syarat yang diakui secara syariat dan juga diakui oleh sistem hukum positif di Indonesia. Namun, persoalan yang sering menjadi pembahasan adalah bagaimana memaknai syarat keadilan saksi.

Dalam pemikiran ulama kontemporer, keadilan saksi tidak hanya dipahami secara tekstual sebagai seseorang yang bebas dari dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, tetapi lebih kepada bagaimana reputasi seseorang di mata masyarakat dan penerimaan sosial terhadap integritas moralnya.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa keadilan saksi tidak mesti ditakar dengan standar kaku, tetapi cukup jika saksi tersebut tidak dikenal sebagai pelaku maksiat secara terang-terangan dan diterima oleh masyarakat sebagai orang yang dapat dipercaya. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan Az-Zuhaili adalah pendekatan yang realistis dan fungsional terhadap kebutuhan sosial.

Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Awlawiyat* menegaskan bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat modern, hukum Islam harus dipahami dengan memperhatikan realitas sosial. Keadilan saksi menurutnya adalah integritas sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat, bukan pengawasan moral yang berlebihan.

Muhammad Abu Zahrah menekankan bahwa syarat keadilan harus dikaitkan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga kehormatan akad dan hak-hak

keluarga. Baginya, yang terpenting adalah saksi tersebut tidak dikenal sebagai pelaku kejahatan moral dan diterima di lingkungan sosialnya.

Di Indonesia, penggunaan saksi yang hanya memenuhi syarat formal tetapi tidak dilihat dari aspek keadilannya sering terjadi di masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat mempengaruhi validitas akad nikah secara substansi.

Tabel 3.1. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Keadilan Saksi Dalam Akad Nikah

Nama Ulama	Karya Utama	Pandangan tentang Keadilan Saksi	Pendekatan
Yusuf al-Qaradawi	Fiqh al-Mu‘āshir, Fiqh al-Maqāṣid, Fiqh al-Awlawiyyat	Keadilan tidak dipahami secara rigid, cukup berdasarkan integritas sosial. Saksi tidak harus sempurna secara moral, cukup dikenal baik dan tidak fasik secara terang-terangan.	Kontekstual, maqāṣidī, sosial
Wahbah Az-Zuhaili	al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu	Keadilan saksi tidak boleh dipahami secara kaku. Keadilan cukup dinilai dari persepsi masyarakat tentang akhlak dan integritas saksi.	Moderat, perbandingan mazhab (fiqh muqaran)
Muhammad Abu Zahrah	Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsīyah	Menekankan pentingnya keadilan saksi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan kehormatan akad, namun tetap mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang.	Rasional, sosiologis, berbasis maslahat